



## **Pendahuluan**

Fenomena kutukan sumber daya alam (resource curse) telah lama menjadi episentrum perdebatan dalam kajian ekonomi politik pembangunan di berbagai belahan dunia. Eksploitasi sumber daya alam (SDA) secara masif di sektor industri ekstraktif, seperti minyak, gas, dan pertambangan, sering kali melahirkan ilusi kesejahteraan ekonomi yang semu bagi wilayah penghasilnya. Sejarah perekonomian global mencatat bahwa periode "booming" komoditas kerap kali diikuti oleh stagnasi ekonomi yang mendalam, atau bahkan deindustrialisasi, ketika cadangan ekstraktif tersebut mulai menipis (Sholikin, 2018). Alih-alih menciptakan kemandirian jangka panjang, ketergantungan absolut pada pendapatan instan dari sektor ekstraktif justru mematikan daya saing sektor-sektor produktif tradisional, memicu inflasi lokal, dan menciptakan kerentanan struktural yang akut (Gmür, 2020). Fenomena patologis ini menjadi ancaman nyata dan preseden buruk bagi daerah-daerah kaya sumber daya yang terjebak dalam zona nyaman penerimaan dana bagi hasil, tanpa menyadari bahwa umur keekonomian cadangan ekstraktif

bersifat non-renewable dan memiliki batas demarkasi akhir yang mutlak.

Menyadari realitas ancaman tersebut, diskursus akademik dan arsitektur kebijakan global mengenai industri ekstraktif kini mulai mengalami pergeseran paradigma yang radikal. Literatur kontemporer, sebagaimana disoroti secara tajam dalam berbagai kajian mutakhir mengenai pergeseran tata kelola tambang (diskursus Beyond Closure), menegaskan bahwa penutupan tambang tidak lagi dapat direduksi secara sempit sebagai sekadar proses administratif pengakhiran operasional korporasi belaka. Era transisi pasca-tambang (post-mining transition) kini menuntut untuk dipahami dan direkayasa sebagai sebuah transformasi regional yang multidimensi, sistemik, dan berkeadilan (just transition) (Mwakyambiki et al., 2020). Tantangan terbesarnya bukan sekadar tentang bagaimana meninggalkan area bekas eksploitasi dalam kondisi yang aman secara fisik, melainkan tentang bagaimana merekonstruksi masa depan wilayah tersebut secara sosial dan ekonomi agar fondasi peradabannya tidak runtuh ketika mesin-mesin industri padat modal berhenti beroperasi secara permanen (Sholikin, 2021).

Meskipun kesadaran akan pentingnya transisi ini mulai tumbuh, studi-studi terdahulu mengenai tata kelola pasca-ekstraktif masih memiliki bias epistemologis yang sangat kuat dan sektoral. Mayoritas literatur arus utama—mulai dari evaluasi kebijakan reklamasi kawasan tambang batu bara di Amerika Serikat bagian timur, tinjauan restorasi bentang alam pasca-tambang di benua Afrika, hingga berbagai studi teknis tentang pemulihan biodiversitas dan remediasi tanah di lahan kritis—tampak masih terperangkap murni pada paradigma pelestarian lingkungan (environmental-centric) (Rusimbi & Mbilinyi, 2005). Fokus utama dari perdebatan riset-riset berskala internasional tersebut secara absolut didominasi oleh isu-isu remediasi ekologis, penataan kembali kontur geologis lahan, dan stabilitas fisik area bekas tambang. Sangat sedikit studi yang secara serius membongkar dimensi "ekonomi politik" dari proses transisi tersebut, khususnya yang secara spesifik mengkaji nasib keberlanjutan aktor-aktor ekonomi skala mikro yang hidup dan menggantungkan nasib di lingkaran tambang pasca-eksploitasi.

Di sinilah letak titik berangkat (point of departure) sekaligus kebaruan (novelty) pertama dari studi penelitian

ini. Alih-alih mengulang narasi konvensional tentang restorasi ekologi fisik lahan seperti halnya mainstream studi-studi terdahulu, riset ini menawarkan sebuah pisau analisis ekonomi politik untuk membedah fase krusial masa transisi pasca-ekstraktif (post-mining era) (Zamasiya & Dhlakama, 2019). Penelitian ini secara radikal meletakkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat lokal—yang terepresentasikan secara nyata melalui keberadaan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)—sebagai pusat gravitasi analisis. Kebaruan ini menjadi sangat esensial karena ia berupaya membongkar "ruang gelap" dalam kajian tata kelola SDA, yakni menyoroti secara kritis relasi kuasa, pertarungan kepentingan elite birokrasi, serta arah keberpihakan politik (political will) penguasa lokal dalam menyelamatkan urat nadi ekonomi kerakyatan ketika sumber daya penyumbang kas utama daerah kelak menemui ajalnya.

Konteks urgensi penelitian ini semakin menemukan presisi dan relevansinya ketika ditarik ke dalam lanskap tata kelola desentralisasi fiskal di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data alokasi dan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD)

serta postur fiskal dalam beberapa tahun terakhir, sangat terlihat jelas bagaimana struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di kabupaten/kota penghasil tambang dan migas memiliki tingkat ketergantungan yang sangat ekstrem terhadap instrumen Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (Lusasi & Mwaseba, 2020). Kucuran dana triliunan rupiah dari pemerintah pusat ini dalam banyak realitas empiris justru memberikan "efek candu" (narkosis fiskal) bagi pemerintah daerah. Fenomena ini memicu kemalasan institusional, di mana daerah terbiasa mengeksekusi agenda pembangunan infrastruktur fisik dengan anggaran raksasa tanpa perlu bersusah payah menggenjot kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor non-ekstraktif yang lebih berkelanjutan (Sholikin, 2019).

Kabupaten Bojonegoro tampil sebagai "laboratorium hidup" (living laboratory) yang paling representatif sekaligus krusial untuk memotret fenomena paradoksal ini secara utuh dan mendalam. Sebagai lumbung energi strategis yang menyumbang persentase sangat signifikan terhadap produksi minyak mentah nasional—terutama melalui eskalasi operasionalisasi Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu—

Bojonegoro saat ini tengah menikmati puncak kejayaan fiskal dengan rekor lonjakan APBD yang fantastis. Namun, di balik angka-angka agregat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang meroket tajam di atas kertas, bersemayam sebuah ilusi pertumbuhan yang sangat timpang. Sektor migas menciptakan kantong-kantong kekayaan elitis, memicu Dutch Disease skala lokal melalui inflasi yang tak terkendali dan standar upah semu, sementara sektor riil masyarakat akar rumput sering kali tertatih-tatih dan sangat rentan terhadap guncangan ganda (double shock) manakala sumur-sumur minyak tersebut mulai mengering.

Dalam konstelasi arsitektur ekonomi yang asimetris dan berisiko tinggi tersebut, keberadaan sektor UMKM di wilayah ekstraktif Bojonegoro berada pada posisi yang sangat rentan dan paradoksal. Di satu sisi, UMKM diakui secara universal sebagai pilar penyerap tenaga kerja lokal terbesar, instrumen pemerataan pendapatan, dan katup pengaman ketahanan sosial yang terbukti selalu resisten di setiap siklus krisis ekonomi. Namun di sisi lain, ekosistem UMKM lokal justru kerap terhimpit oleh hegemoni dan derap ekspansi industri ekstraktif—mulai dari kesulitan memperebutkan akses ruang

dan kapital, tercekik oleh lonjakan biaya logistik lokal, hingga minimnya instrumen regulasi kaku yang memaksa pelibatan entitas UMKM lokal secara adil dalam rantai pasok industri raksasa. Menghadapi era senjakala ekstraktif yang kian membayang, UMKM tidak memiliki pilihan lain kecuali harus direkayasa ulang secara struktural untuk disiapkan sebagai "sekoci penyelamat" (economic lifeboat) bagi masa depan daerah.

Untuk mentransformasi UMKM agar mampu mengambil alih tampuk kepemimpinan ekonomi pasca-migas, pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya berlindung di balik narasi mekanisme pasar bebas atau sekadar memelas pada inisiatif karikatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dibutuhkan sebuah intervensi institusional yang sistematis, agresif, dan terukur melalui perumusan kebijakan afirmatif (affirmative policy) yang direkam kuat dalam postur dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Rencana Kerja (RENJA) dari dinas teknis terkait, seperti Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, wajib direposisi fungsinya (Majamba, 2020). Dokumen tersebut tidak boleh lagi sekadar menjadi daftar rincian belanja birokratis tahunan, melainkan harus bertransformasi menjadi cetak biru (blueprint) dari

desain perlindungan regulasi, afirmasi alokasi anggaran, dan strategi peningkatan kapasitas UMKM agar mereka mampu melepaskan diri dari kutukan bayang-bayang industri ekstraktif (Sholikin, 2025).

Argumentasi di atas secara langsung mengkristalkan kebaruan (novelty) kedua dari studi penelitian ini. Selama lebih dari satu dekade terakhir, dominasi literatur sosiologi dan ekonomi mengenai masyarakat di wilayah lingkaran tambang Indonesia hampir secara eksklusif berfokus pada evaluasi efektivitas program pemberdayaan korporasi (CSR), mediasi penyelesaian konflik agraria, atau skema ganti rugi dampak lingkungan. Riset ini secara berani melampaui pendekatan usang tersebut dengan menggeser fokus analisis secara total kepada entitas Pemerintah Daerah sebagai aktor utama yang berdaulat, meminjam kerangka konseptual Local Developmental State (Negara Pembangunan Tingkat Lokal). Penelitian ini mengubah pertanyaan penelitian konvensional dari "apa yang diberikan oleh perusahaan untuk warga?" menjadi diskursus kritis yang menantang: "bagaimana birokrasi daerah mengeksploitasi privilese kelimpahan dana migas hari ini untuk menyusun, membiayai, dan mengeksekusi grand-

design kebijakan proteksi UMKM demi pertahanan ekonomi esok hari?".

Membongkar dan menelanjangi dinamika ekonomi politik di tingkat lokal inilah yang menjadi arena kontestasi riset yang sangat menjanjikan, kompleks, sekaligus krusial. Merumuskan kebijakan afirmatif bagi UMKM untuk menyongsong masa pasca-ekstraktif bukanlah sekadar persoalan teknokratis tentang bagaimana menyusun program pelatihan kewirausahaan atau memfasilitasi sertifikasi produk. Lebih jauh dari itu, ini adalah sebuah ujian keras bagi integritas, visi jangka panjang, dan political will dari elite penguasa daerah. Terdapat benturan struktural yang sangat nyata berupa pragmatisme elite politik lokal yang secara rasional lebih memilih mendistribusikan triliunan rupiah uang migas untuk proyek-proyek infrastruktur monumental dan bantuan sosial populis demi mengamankan insentif elektoral jangka pendek, ketimbang menginvestasikannya dalam proses pembinaan kapasitas UMKM yang rumit, panjang, dan tidak populis secara instan (Sholikin et al., 2025).

Berangkat dari labirin kompleksitas masalah tersebut, penelitian ini dirancang secara metodologis untuk membedah kesenjangan (gap) yang lebar antara

retorika politik pro-ekonomi kerakyatan dengan realitas dingin alokasi sumber daya di lapangan. Melalui penelusuran dokumen strategis secara kritis—mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), postur dan rasio Dana Bagi Hasil dalam APBD, hingga sinkronisasinya dengan Rencana Kerja dinas pelaksana teknis—riset ini akan membuktikan sejauh mana kesadaran eksistensial pemerintah daerah dalam berpacu melawan waktu kehabisan sumber daya. Analisis ini akan menjawab secara koheren dan saintifik apakah wacana "Era Pasca-Ekstraktif" benar-benar telah diantisipasi dengan kebijakan afirmatif pro-UMKM yang memadai secara politik maupun finansial, ataukah sebatas menjadi jargon kosmetik yang menghiasi dokumen pemerintahan namun kosong dari eksekusi nyata.

Sebagai konklusi dari seluruh konstelasi pemikiran tersebut, penelitian yang mengambil tajuk "Ekonomi Politik Masa Transisi: Kebijakan Afirmatif UMKM Menghadapi Ancaman Pasca-Ekstraktif (Post-Mining Era) di Tingkat Daerah" ini memiliki signifikansi akademik dan urgensi kebijakan yang tidak dapat ditawar lagi. Mengawinkan kekosongan literatur global mengenai dimensi sosio-ekonomi dari transisi

pasca-tambang dengan potret empiris tata kelola fiskal di daerah sentra migas menghasilkan sebuah kerangka analitis yang inovatif, kritis, dan mendobrak kejumudan riset konvensional. Riset ini tidak hanya diproyeksikan untuk mengisi celah teori ekonomi politik tata kelola sumber daya lokal, namun secara imperatif diharapkan mampu melahirkan sebuah peta jalan (roadmap) advokasi kebijakan yang strategis; memaksa lahirnya intervensi afirmatif yang inklusif bagi UMKM, tepat sebelum tetes minyak dan butiran mineral terakhir benar-benar habis terkuras dari perut bumi.

### **Tinjauan Pustaka**

Tinjauan literatur global mengenai tata kelola pasca-tambang (post-mining governance) secara historis sangat didominasi oleh diskursus ilmu alam dan rekayasa lingkungan. Studi-studi klasik hingga kontemporer, sebagaimana terefleksi kuat dalam berbagai kajian reklamasi lahan di kawasan tambang batu bara Amerika Serikat bagian timur maupun proyek restorasi lanskap di benua Afrika, cenderung mereduksi terminologi "transisi" sekadar pada upaya remediasi ekologis semata (Ovadia, 2022). Fokus utama dari literatur arus utama ini terpaku pada inovasi teknik

fitoremediasi, reboisasi lahan kritis, stabilisasi kontur geologis, penataan kualitas air, serta pemulihan biodiversitas pasca-eksploitasi. Dalam paradigma yang sangat environmental-centric ini, keberhasilan era pasca-tambang diukur secara kaku melalui parameter teknis kembalinya fungsi fisik dan kimiawi lahan. Sementara itu, dimensi manusia—khususnya ketahanan struktur ekonomi masyarakat lokal yang berpotensi kehilangan mata pencaharian utama—sering kali direnggut dari pusat panggung analitis dan hanya diposisikan sebagai variabel pelengkap yang diasumsikan akan pulih dengan sendirinya seiring membaiknya kondisi alam (Shoimah et al., 2025).

Kritik tajam terhadap bias ekologis tersebut perlahan memicu gelombang literatur baru yang mengusung paradigma Beyond Closure (Melampaui Penutupan Tambang). Kajian-kajian mutakhir ini mulai menyadari secara kritis bahwa penutupan fasilitas ekstraktif menyisakan ruang hampa ekonomi yang sangat masif dan berpotensi memicu keruntuhan tatanan sosial (social collapse) bagi wilayah sekitarnya. Konsep Just Transition (Transisi Berkeadilan) kini mulai mewarnai literatur manajemen sumber daya alam,

yang menekankan pentingnya repurposing (alih fungsi) aset bekas tambang dan urgensi transformasi sosio-ekonomi wilayah secara komprehensif (Ovadia, 2024). Pergeseran konseptual ini menegaskan bahwa tanggung jawab pasca-ekstraktif tidak boleh lagi dikerdilkan menjadi sekadar kewajiban reklamasi fisik oleh korporasi, melainkan harus mencakup rekayasa ulang arsitektur ekonomi daerah. Namun demikian, meskipun wacana transisi sosio-ekonomi ini mulai menggema, operasionalisasinya dalam literatur akademik masih sangat abstrak, normatif, dan minim elaborasi empiris mengenai siapa aktor institusional yang sejatinya harus memimpin, merancang, dan membiayai orkestrasi transisi tersebut di tingkat tapak.

Untuk mengisi kekosongan analisis mengenai aktor tersebut, literatur ekonomi politik pembangunan menawarkan kerangka diagnostik melalui teori Kutukan Sumber Daya Alam (Resource Curse) dan Dutch Disease pada skala sub-nasional. Berbagai studi mengonfirmasi bahwa daerah kaya sumber daya sering kali terjebak dalam "ilusi kekayaan" yang dipicu oleh tingginya aliran dana transfer dari pemerintah pusat, seperti instrumen Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya

Alam (Ovadia & Amofo, 2023). Kajian fiskal desentralisasi menunjukkan bahwa ketergantungan yang ekstrem pada kucuran DBH sering kali memicu patologi birokrasi berupa perilaku pemburuan rente (rent-seeking behaviour) di kalangan elite politik lokal. Kemudahan memperoleh pendapatan dari dana bagi hasil ini melemahkan insentif pemerintah daerah untuk membangun dan memajukan sektor non-ekstraktif, yang proses perizinan dan pemungutan pajaknya jauh lebih rumit. Akibatnya, pemerintah daerah terjankit kemalasan institusional, di mana mereka lebih memilih menghamburkan "uang mudah" dari migas untuk membiayai proyek infrastruktur populis bervolume besar, alih-alih merancang perlindungan ekonomi jangka panjang.

Sebagai antitesis dari keputusan teoretis Resource Curse, sebagian literatur ilmu politik dan administrasi publik mengajukan kerangka Local Developmental State (Negara Pembangunan Tingkat Lokal). Konsep ini menuntut entitas pemerintah daerah untuk bertindak jauh lebih progresif dari sekadar administrator pelayanan dasar atau kasir penyalur dana bagi hasil. Dalam literatur ini, pemerintah daerah yang ideal di kawasan berisiko tinggi harus menjelma



studi ekonomi politik komprehensif yang menjahit kedua kutub diskursus ini melalui evaluasi kritis terhadap perumusan "kebijakan afirmatif spesifik bagi sektor UMKM" di tingkat lokal. Penelitian ini hadir secara strategis untuk mengintervensi ruang kosong tersebut dengan menawarkan proposisi kebaruan: bahwa keberhasilan transisi menuju era pasca-ekstraktif sama sekali tidak ditentukan oleh megahnya program pasca-operasi korporasi, melainkan murni ditentukan oleh konstelasi ekonomi politik pemerintah daerah—sejauh mana mereka memiliki determinasi politik untuk membajak privilese fiskal hari ini demi merancang kebijakan yang memproteksi ekosistem UMKM sebagai fondasi peradaban ekonomi tunggal di masa depan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal terpancang (embedded single-case study) yang berpijak pada tradisi analisis ekonomi politik institusional. Pendekatan ini dipilih secara sengaja karena objek yang diteliti—yakni formulasi alokasi anggaran dan eksekusi kebijakan afirmatif bagi UMKM—bukanlah sekadar variabel teknokratis yang dapat dipahami semata-mata melalui analisis

statistik, melainkan produk dari kontestasi kepentingan, relasi kuasa, dan political will elite birokrasi daerah. Melalui lensa kualitatif kritis ini, penelitian berupaya membongkar secara mendalam fenomena paradoksal kerentanan struktural ekonomi di balik melimpahnya dana ekstraktif, serta membedah rasionalitas aparatur negara di tingkat lokal dalam merespons ancaman senjakala pasca-tambang melalui instrumen kebijakan publik.

Lokus penelitian ini secara spesifik ditetapkan di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, yang secara empiris berfungsi sebagai episentrum industri ekstraktif minyak dan gas (migas) nasional melalui operasionalisasi Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada argumen purposive bahwa Bojonegoro saat ini tengah mengalami anomali dan puncak kejayaan fiskal, dengan tingkat ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat ekstrem terhadap instrumen Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam. Kondisi di mana kas daerah mengalami obesitas akibat "uang mudah" (easy money) migas, namun secara bersamaan dihadapkan pada kepastian matematis akan penipisan cadangan absolut di masa

depan, menjadikan Bojonegoro sebagai laboratorium tata kelola yang paling representatif untuk menguji tesis Local Developmental State dan mengevaluasi kesiapsiagaan daerah dalam membangun sekoci ekonomi kerakyatan.

Teknik pengumpulan data dibangun melalui mekanisme triangulasi sumber yang ketat, memadukan ekstraksi data sekunder (analisis dokumen strategis) dan pengumpulan data primer (wawancara mendalam). Pada tahap pertama, pembedahan dokumen dilakukan secara ekstensif terhadap produk perencanaan fiskal dan regulasi, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), postur APBD, struktur Transfer ke Daerah (TKD) dari Kementerian Keuangan, hingga Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro tahun berjalan. Selanjutnya, untuk memvalidasi narasi politik di balik angka-angka anggaran tersebut, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan kepada informan kunci yang ditarik menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Informan tersebut mencakup elite perencana di Bappeda, pejabat pengambil keputusan di dinas teknis terkait, anggota Badan Anggaran

DPRD yang mengawal persetujuan fiskal, serta representasi asosiasi pelaku UMKM lokal yang menjadi objek kebijakan.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif, yang menjalankan proses kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara dialektis dan terus-menerus. Pada fase awal, data kuantitatif makro (seperti persentase alokasi anggaran pemberdayaan UMKM yang dikontraskan dengan total APBD dan DBH Migas) diolah terlebih dahulu untuk membuktikan derajat bias alokasi belanja dan mengukur wujud political will secara numerik. Hasil pembacaan dokumen anggaran tersebut kemudian dikonfrontasi silang secara kritis dengan transkrip wawancara untuk melacak jejak pemburuan rente (rent-seeking behaviour), hegemoni aktor dominan, dan motivasi pragmatisme politik di balik penyusunan regulasi. Keseluruhan temuan empiris ini kemudian disintesis dan didialogkan dengan kerangka teori Resource Curse dan tata kelola transisi pasca-tambang, guna menghasilkan konklusi yang ajeg mengenai efektivitas dan arah keberpihakan kebijakan transisi ekonomi di daerah ekstraktif.

### **Hasil dan Pembahasan**

Bagian ini menyajikan temuan lapangan dan analisis mendalam

mengenai dinamika ekonomi politik di Kabupaten Bojonegoro dalam menghadapi fase krusial masa transisi. Paparan diawali dengan membedah realitas struktur keuangan daerah yang menjadi basis material bagi seluruh pengambilan keputusan politik. Melalui pengolahan data primer dan sekunder, analisis ini akan menelanjangi bagaimana kelimpahan sumber daya ekstraktif yang ada saat ini justru membentuk pola ketergantungan yang mengkhawatirkan, sekaligus menjadi ujian bagi kemandirian fiskal daerah di masa depan. Sebagai fondasi untuk memahami seluruh rangkaian kebijakan publik yang lahir, sub-bab berikut akan membongkar secara kritis postur APBD Bojonegoro sebagai bukti empiris dari fenomena kutukan sumber daya yang tengah berlangsung.

### **Anatomi Ketergantungan Fiskal: Bukti Empiris *Resource Curse* dalam Postur APBD Bojonegoro**

Membedah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tidak ubahnya seperti memeriksa anatomi pasien yang mengidap obesitas akut namun rapuh secara struktural. Fenomena ini secara presisi mengonfirmasi tesis klasik tentang kutukan sumber daya alam (*resource curse*). Penerimaan daerah

yang didominasi secara mutlak oleh kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, telah menciptakan ilusi kesejahteraan. Pemerintah daerah seolah-olah memiliki kapasitas fiskal yang tak terbatas untuk membiayai pembangunan, namun fondasi penerimaan tersebut berdiri di atas komoditas yang tidak dapat diperbarui (*non-renewable*) dan sangat rentan terhadap siklus penipisan cadangan alamiah (Pusceddu & Zerilli, 2024).

Skala ketergantungan yang ekstrem ini tidak bisa lagi dipandang sekadar sebagai kewajaran bagi sebuah daerah penghasil, melainkan sebuah sinyal bahaya bagi ketahanan ekonomi masa depan. Hal ini dibuktikan secara empiris melalui dokumen Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024, di mana DBH Sumber Daya Alam Migas yang diterima Bojonegoro mendominasi lebih dari 50% hingga 60% postur total pendapatan APBD yang menembus angka fantastis di kisaran Rp 7 hingga 8 Triliun. Ketimpangan postur ini memperlihatkan bahwa ruang fiskal daerah nyaris sepenuhnya disetir oleh satu sektor tunggal yang eksploitatif, mengesampingkan potensi diversifikasi ekonomi, dan menjadikan Bojonegoro

sangat rentan terhadap volatilitas harga minyak global.

Kondisi kelimpahan "uang mudah" (easy money) inilah yang kemudian melahirkan patologi birokrasi yang dikenal sebagai "narkosis fiskal" atau efek candu anggaran. Ketika triliunan rupiah masuk ke kas daerah secara otomatis setiap tahun sebagai hak bagi hasil, pemerintah daerah kehilangan dorongan alamiah dan urgensi politis untuk memeras keringat merumuskan kebijakan yang dapat menggenjot sektor produktif lain. Inovasi untuk memperbesar basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor non-ekstraktif, atau upaya serius untuk mengekspansi skala ekonomi lokal, menjadi agenda yang terus-menerus dikesampingkan karena tidak dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan kas daerah saat ini.

Kemalasan institusional dalam mengoptimalkan kemandirian fiskal ini diakui secara implisit oleh para aktor perencana kebijakan di tingkat lokal. Pernyataan ini sejalan dengan ungkapan Informan A, seorang pejabat strategis di Bappeda Bojonegoro, yang dalam wawancara menyatakan, "Selama dana migas masih mengalir deras, jujur saja sangat sulit meyakinkan eksekutif maupun legislatif untuk bersusah payah

menggenjot PAD dari sektor riil; usahanya sangat besar dan berdarah-darah, namun kontribusinya terlihat sangat kerdil jika disandingkan dengan satu kali transfer DBH Migas." Kutipan ini memvalidasi secara gamblang bahwa besarnya APBD hari ini justru menjadi disinsentif psikologis dan politis bagi pembangunan fundamental ekonomi daerah jangka panjang.

Kesenjangan yang semakin menganga antara DBH Migas yang raksasa dan laju pertumbuhan PAD yang merangkak pelan memunculkan kepastian akan datangnya fiscal shock (guncangan fiskal) di masa depan. Perlu disadari secara matematis bahwa setiap barel minyak yang disedot dari perut bumi Bojonegoro hari ini semakin mendekatkan daerah tersebut pada titik nadir penurunan produksi alamiah (decline rate). Ketika siklus ekstraktif ini mencapai batas keekonomiannya dan sumur mulai mengering, APBD yang terbiasa gemuk akan mengalami kontraksi yang sangat brutal. Berhentinya aliran dana triliunan rupiah ini berpotensi memicu kelumpuhan layanan publik dan menghentikan roda pembangunan daerah secara instan jika sekoci penyelamat tidak disiapkan sejak dini.

Tragedi ekonomi makro ini ironisnya justru diperparah oleh efek crowding-out yang secara perlahan mencekik sektor riil di akar rumput. Kehadiran industri ekstraktif padat modal menciptakan distorsi pasar berskala lokal, memicu apresiasi harga barang dan jasa, serta menetapkan standar upah semu yang sama sekali tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat luas. Ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal menjadi pihak yang paling terhimpit; mereka kalah saing dalam memperebutkan tenaga kerja yang tergiur standar gaji tambang, dan di saat yang sama kesulitan menekan biaya logistik akibat inflasi daerah yang digerakkan oleh perputaran uang di sektor elite tersebut (Measham et al., 2024).

Di tengah himpitan struktural dan ancaman transisi tersebut, intervensi anggaran dari pemerintah daerah untuk memproteksi sektor ekonomi kerakyatan terbukti masih sebatas jargon politik di atas kertas. Fakta ini terekam jelas dari keluhan Informan B, salah satu pengurus asosiasi UMKM di Bojonegoro, yang secara kritis menegaskan, "Kami di tingkat bawah selalu disebut sebagai pahlawan ekonomi oleh para pejabat, tetapi kalau dibedah dalam Rencana

Kerja dinas, alokasi anggaran belanja langsung untuk pembinaan struktural dan fasilitasi permodalan UMKM bahkan tidak sampai 2 persen dari total APBD yang triliunan itu." Temuan ini secara telanjang membongkar ilusi kebijakan afirmatif; membuktikan bahwa kelimpahan fiskal sama sekali tidak berbanding lurus dengan keberpihakan politik anggaran pada entitas ekonomi lokal.

Sebagai konklusi dari analisis sub-bab ini, anatomi postur APBD Bojonegoro menyajikan bukti tak terbantahkan bahwa daerah ini sedang berjalan di atas bom waktu ekonomi. Fenomena resource curse bukan sekadar literatur akademik, melainkan realitas empiris yang tervalidasi oleh dominasi absolut DBH Migas, stagnasi kemandirian PAD, dan terpinggirkannya agenda pemberdayaan UMKM secara struktural. Transisi ekonomi menuju era pasca-ekstraktif karenanya bukanlah sebuah wacana opsional, melainkan mandat eksistensial. Kegagalan elite penguasa lokal dalam membajak momentum kejayaan fiskal hari ini untuk membangun ekosistem UMKM yang tangguh, hanya akan mewariskan keruntuhan arsitektur ekonomi bagi generasi mendatang.

### **Marginalisasi Sektor Riil: Posisi Rentan UMKM di Bawah Bayang-Bayang Ekstraktif**

Kehadiran industri ekstraktif berskala raksasa di Kabupaten Bojonegoro menyajikan sebuah paradoks pembangunan yang ironis. Di satu sisi, daerah ini menjelma menjadi magnet pertumbuhan investasi padat modal, namun di sisi lain, sektor riil yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat akar rumput justru mengalami marginalisasi yang sistematis. Kontras ini paling nyata terlihat pada nasib ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang bukannya ikut terangkat oleh gelombang kekayaan migas, melainkan semakin terhimpit oleh bayang-bayang kebesaran industri tersebut. Fenomena ini secara empiris membantah narasi linear kaum developmentalis yang mengasumsikan bahwa keberadaan megaprojek akan secara otomatis menciptakan efek tetesan ke bawah (*trickle-down effect*) yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat lokal (Melchers et al., 2016).

Kesenjangan struktural ini terekam secara telanjang dalam postur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang mengalami anomali. Dominasi absolut sektor pertambangan telah mendistorsi arsitektur

makroekonomi Bojonegoro, menyisakan ruang tumbuh yang sangat sempit bagi sektor-sektor padat karya tempat mayoritas masyarakat bergantung hidup. Hal ini dibuktikan dengan data BPS Kabupaten Bojonegoro dalam publikasi PDRB tahun 2023, di mana sektor pertambangan dan penggalian migas menyumbang lebih dari 45% total struktur PDRB daerah, sementara sektor industri pengolahan mikro dan perdagangan yang menjadi basis utama UMKM lokal masing-masing hanya mampu meraup kontribusi stagnan di kisaran angka 4% hingga 6%. Ketimpangan angka ini mengonfirmasi terjadinya divergensi yang tajam; ketika mesin ekonomi ekstraktif melaju sangat kencang, roda ekonomi kerakyatan justru tertinggal jauh di belakang.

Lebih jauh, dominasi tak tertandingi dari industri padat modal ini memicu manifestasi patologi ekonomi yang dikenal sebagai Dutch Disease (Penyakit Belanda) dalam skala lokal. Kucuran dana triliunan rupiah yang berputar di ekosistem elite perusahaan ekstraktif memicu apresiasi nilai barang, jasa, dan sewa lahan di sekitar area operasional (*ring satu*). Lonjakan inflasi daerah yang secara artifisial didorong oleh standar konsumsi para pekerja migas (*expatriate* maupun pekerja

terampil dari luar daerah) menciptakan tekanan ganda yang meremukkan pelaku UMKM. Di saat daya beli masyarakat umum tidak mengalami peningkatan yang sepadan, UMKM harus menanggung beban lonjakan biaya produksi, bahan baku, dan operasional logistik yang semakin mencekik keleluasaan finansial mereka.

Selain hantaman inflasi lokal, UMKM juga dipaksa berhadapan dengan distorsi pasar tenaga kerja yang secara destruktif merusak daya saing produksi mereka. Standar upah, tunjangan, dan fasilitas premium yang ditawarkan oleh korporasi multinasional serta rantai subkontraktornya menciptakan ekspektasi upah semu di kalangan angkatan kerja lokal, sebuah standar yang secara rasional sama sekali tidak mampu dipenuhi oleh entitas usaha mikro. Kesulitan struktural ini diamini secara nyata oleh Informan C, seorang pemilik usaha konfeksi dan kerajinan lokal di wilayah ring satu Blok Cepu, yang mengeluhkan, "Sangat susah mencari penjahit atau tenaga produksi sekarang. Anak-anak muda di desa ini lebih memilih menganggur berbulan-bulan menunggu panggilan kerja harian lepas sebagai kuli proyek di pengeboran dengan gaji besar, daripada bekerja tetap

di tempat kami dengan standar gaji UMKM."

Harapan politis bahwa industri ekstraktif akan mengintegrasikan warga lokal melalui penciptaan ekosistem bisnis turunan (multiplier effect) ternyata sebagian besar bermuara pada ilusi belaka. Pada kenyataannya, partisipasi UMKM lokal dalam pusaran pusaran raksasa ekonomi migas ini bersifat sangat marginal, perifer, dan inferior. Alih-alih bertransformasi menjadi vendor penyuplai yang tangguh, masyarakat lokal hanya dibiarkan menangkap remah-remah limpahan ekonomi di kasta paling bawah. Mereka terperangkap secara sosiologis dalam penyediaan jasa katering skala kecil, penyewaan kamar indekos, pendirian warung kopi pinggir jalan, atau jasa penatu untuk pekerja tambang tingkat bawah—sebuah jenis usaha rentan yang akan seketika gulung tikar manakala fase konstruksi fisik proyek selesai dan jumlah pekerja dipangkas drastis.

Kegagalan UMKM lokal untuk "naik kelas" dan berintegrasi ke dalam rantai pasok global (global supply chain) industri migas berakar kuat pada tingginya hambatan masuk (barrier to entry) teknis dan manajerial. Korporasi ekstraktif multinasional secara inheren menerapkan standar kualifikasi

pengadaan barang dan jasa yang sangat rigid, mencakup audit sertifikasi ISO, standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (HSE) yang rumit, serta persyaratan jaminan modal perbankan bernilai raksasa. Tanpa adanya intervensi negara melalui fasilitasi teknis dan injeksi modal afirmasi yang masif, persyaratan drakonian ini menjelma menjadi tembok tebal yang mustahil ditembus oleh UMKM lokal. Akibatnya, kontrak-kontrak pengadaan bernilai fantastis secara niscaya terbang ke luar daerah, dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar berskala nasional dari ibu kota.

Ironisnya, di tengah kondisi medan pertempuran ekonomi yang jelas-jelas tidak berimbang tersebut, entitas pemerintah daerah tampak mandul dalam menghadirkan instrumen proteksi regulasi yang memadai bagi warganya. Intervensi kebijakan lokal untuk memaksa pelibatan entitas UMKM sangatlah lemah, ketiadaan landasan yuridis yang memaksa membuat industri ekstraktif dapat beroperasi tanpa kewajiban moral dan legal untuk membina rantai pasok lokal secara serius (Kretschmann et al., 2017). Pernyataan ini sejalan dengan ungkapan Informan D, seorang anggota Badan Anggaran DPRD Bojonegoro, yang secara tajam

mengkritik, "Sampai detik ini pemerintah daerah belum berani mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) spesifik dan radikal yang mengatur rigid tentang Local Content Requirement (Kewajiban Penggunaan Komponen Lokal) khusus UMKM bagi operasional migas. Akibatnya, pelibatan pengusaha lokal kita murni hanya diserahkan pada belas kasihan klausul CSR perusahaan, bukan dijamin sebagai hak mutlak ekonomi warga daerah."

Sebagai konklusi dari elaborasi di atas, marginalisasi sektor riil di wilayah ekstraktif Bojonegoro bukanlah representasi dari kegagalan pasar (market failure) yang terjadi secara alamiah, melainkan manifestasi dari kegagalan politik dan kebijakan negara (policy failure). Posisi rentan UMKM di bawah bayang-bayang industri ekstraktif secara empiris membuktikan bahwa tanpa kebijakan afirmatif dan regulasi proteksionis yang agresif dari pemerintah daerah, keberadaan sumber daya alam hanya akan mengeksploitasi wilayah lokal tanpa membangun ketahanan warganya. Jika pembiaran struktural ini terus dipertahankan, maka pada saat cadangan sumur migas tersebut akhirnya mengering, daerah ini tidak hanya akan menangi hilangnya pendapatan utama, tetapi juga akan

tersadar bahwa sekoci ekonomi UMKM mereka telah lama bocor, lapuk, dan tidak lagi mampu diandalkan untuk berlayar.

### **Ilusi Kebijakan Afirmatif: Evaluasi Kritis Alokasi Anggaran dan Perencanaan UMKM**

Merespons ancaman senjakala ekstraktif yang kian nyata, arsitektur teknokratis pemerintah daerah semestinya diletakkan pada garda terdepan untuk merekayasa sekoci ekonomi alternatif. Dalam diskursus kebijakan publik, komitmen transisi tata kelola ekonomi ini hanya dapat diuji melalui satu indikator obyektif yang tak bisa dimanipulasi: postur alokasi sumber daya. Sayangnya, pembedahan kritis terhadap instrumen Rencana Kerja (Renja) serta implementasi riil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bojonegoro justru menyingkap sebuah realitas yang amat paradoksal. Terdapat kesenjangan (gap) yang sangat lebar dan menganga antara retorika politik pro-UMKM yang kerap didengungkan secara populis di ruang publik, dengan komitmen alokasi anggaran yang secara definitif disahkan di atas meja birokrasi.

Kesenjangan ini mengkrystal menjadi sebuah ilusi kebijakan afirmatif ketika proporsi anggaran untuk sektor

ekonomi kerakyatan dikontraskan dengan total kekayaan daerah. Di tengah kelimpahan triliunan rupiah uang migas yang dikelola, porsi belanja langsung yang didedikasikan untuk intervensi struktural UMKM terbukti sangat marjinal dan tidak mencerminkan urgensi krisis masa depan. Hal ini dibuktikan secara telanjang melalui dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, di mana alokasi pagu anggaran untuk program pemberdayaan usaha menengah, kecil, dan mikro nyatanya tidak menyentuh angka 2 persen dari total APBD Bojonegoro yang mencapai lebih dari 7 triliun rupiah. Angka yang sangat kerdil ini secara otomatis menggugurkan klaim bahwa birokrasi lokal telah meletakkan ekosistem UMKM sebagai prioritas utama dan jangkar penyelamat ekonomi pasca-tambang.

Minimnya injeksi modal fiskal ke dalam pembuluh darah sektor riil ini membuktikan bahwa narasi keberpihakan hanyalah komoditas politik belaka (Everingham et al., 2022). Ketika sebuah entitas pemerintahan memiliki keleluasaan fiskal yang luar biasa (berkat Dana Bagi Hasil) namun menolak untuk mengalokasikan

persentase yang memadai demi membangun ketahanan ekonomi warganya, maka problem utamanya bukanlah kelangkaan anggaran, melainkan ketiadaan political will (kemauan politik). Konstelasi penganggaran yang timpang ini memposisikan dinas teknis pembina UMKM sekadar sebagai instrumen pelengkap administratif dalam struktur pemerintahan, bukan sebagai mesin utama penggerak transformasi ekonomi yang memiliki daya gedor memadai untuk menetralsir dampak dominasi industri padat modal.

Lebih memprihatinkan lagi, ketika anggaran yang sangat terbatas tersebut dibedah hingga ke level nomenklatur kegiatan, esensi dari "kebijakan afirmatif" itu sendiri mengalami reduksi makna yang parah. Intervensi negara nyatanya hanya diterjemahkan ke dalam program-program seremonial, karikatif, dan bersifat business as usual. Pernyataan ini sejalan dengan ungkapan Informan E, seorang konsultan dan pendamping UMKM tingkat kabupaten, yang dengan nada pesimistis menyatakan, "Setiap tahun program pemberdayaan dari dinas itu berputar di situ-situ saja sifatnya; bimbingan teknis (Bimtek) pembuatan perizinan NIB, pelatihan melipat kemasan kardus, atau

paling banter diajak pameran di alun-alun kota. Hampir tidak ada program berani yang benar-benar memecahkan kebuntuan permodalan raksasa dan kepastian akses pasar." Kutipan ini merepresentasikan rasa frustrasi di akar rumput terhadap desain kebijakan yang dangkal dan repetitif.

Program-program bimbingan teknis administratif dan fasilitasi pameran lokal tersebut tentu tidak sepenuhnya keliru, namun menjadi sangat ilusif dan tidak proporsional jika diklaim sebagai senjata strategis untuk menghadapi ancaman kebangkrutan ekonomi pasca-ekstraktif. Intervensi institusional yang dibutuhkan dalam era transisi ini haruslah bersifat struktural dan transformatif (Wirth et al., 2012). Di tengah guncangan Dutch Disease yang melumpuhkan sendi produksi lokal, pemerintah daerah semestinya berani mengeksekusi affirmative action yang radikal—seperti penggelontoran subsidi bunga kredit besar-besaran dari kas daerah, pembentukan skema penjaminan modal tanpa agunan melalui BUMD bagi UMKM yang unbankable, atau pembangunan fasilitas produksi bersama berskala industri (seperti rumah kemasan berstandar ekspor) yang mustahil dibangun sendiri oleh pelaku usaha mikro.

Selain absennya afirmasi dari sisi produksi dan permodalan, ilusi kebijakan ini juga termanifestasi dari mandulnya pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem pasar yang terproteksi (captive market). Membiarkan UMKM lokal bertarung bebas tanpa pelindung di tengah distorsi ekonomi wilayah ekstraktif adalah sebuah pengabaian tanggung jawab negara. Tanpa adanya regulasi kaku yang mengikat—seperti penetapan Peraturan Daerah yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN), rantai perhotelan korporat, hingga kontraktor migas untuk menyerap produk lokal Bojonegoro dalam persentase tertentu—pelaku usaha mikro akan terus tergilas. Grand-design mitigasi pasca-ekstraktif semestinya menjadikan proteksionisme pasar lokal ini sebagai fondasi pertahanan, bukan sekadar melepas UMKM ke medan pertempuran pasar bebas yang asimetris.

Akibat dari ketiadaan visi transformatif tersebut, wacana transisi ekonomi dan perlindungan UMKM pada akhirnya hanya terdegradasi menjadi jargon administratif yang menghiasi laporan pertanggungjawaban tahunan. Indikator keberhasilan birokrasi diukur secara mekanis dan artifisial, lebih mementingkan seberapa besar dana pelatihan yang terserap ketimbang

seberapa tangguh resiliensi bisnis yang berhasil dibentuk. Hal ini terekam jelas dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro, di mana target Indikator Kinerja Utama (IKU) pemberdayaan mayoritas hanya mendasarkan pada "jumlah UMKM yang difasilitasi", tanpa disertai parameter evaluasi kelanjutan yang mengukur secara rigid persentase lonjakan omzet riil pasca-intervensi atau tingkat kemandirian UMKM melepaskan diri dari status pra-sejahtera. Dokumen ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa evaluasi kebijakan pemerintah lokal masih terjebak pada pemujaan capaian output semata, dan gagal merengkuh esensi outcome.

Sebagai konklusi dari sub-bab ini, evaluasi kritis terhadap sinkronisasi Rencana Kerja dan postur alokasi pencairan APBD Bojonegoro membuktikan bahwa "sekoci ekonomi" pasca-tambang tersebut masih berupa sketsa usang yang belum pernah benar-benar dirakit. Kebijakan afirmatif yang selama ini diklaim oleh elite pemerintah daerah tidak lebih dari sebuah ilusi teknokratis; sebuah kosmetik kebijakan yang dirancang sekadar untuk menggugurkan kewajiban administratif, alih-alih merespons krisis

deindustrialisasi yang mengintai. Selama triliunan rupiah dana bagi hasil migas tidak dikapitalisasi secara berani untuk membiayai intervensi UMKM yang bersifat masif dan proteksionis, maka narasi "transisi menuju era pasca-ekstraktif" hanyalah fiksi administratif bagi masyarakat lokal yang kelak akan dibiarkan tenggelam saat sumur-sumur minyak itu berhenti berproduksi.

**Dinamika Ekonomi Politik Transisi:  
Pragmatisme Elite dan Absennya  
*Local Developmental State***

Kegagalan teknokratis dalam merumuskan kebijakan afirmatif yang ajeg bagi sektor UMKM—sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya—sejatinya bukanlah sekadar kelalaian administratif yang terjadi secara kebetulan. Dari kacamata ekonomi politik, ilusi kebijakan tersebut adalah produk rasional dari pilihan-pilihan strategis yang secara sadar diambil oleh aktor-aktor politik lokal (Kretschmann, 2020). Analisis mendalam terhadap konstelasi kekuasaan di Bojonegoro menyingkap sebuah realitas pahit mengenai absennya entitas *Local Developmental State* (Negara Pembangunan Tingkat Lokal). Alih-alih bertindak sebagai katalisator visioner yang membajak kelimpahan dana migas hari ini untuk mengamankan fondasi

ekonomi masa depan, pemerintah daerah justru terperangkap dalam nalar birokrasi yang ekstraktif dan rabun jauh. Negara di tingkat lokal gagal memosisikan dirinya sebagai pelindung pasar kerakyatan, dan justru menjelma menjadi sekadar mesin pendistribusi kekayaan yang melayani kepentingan jangka pendek.

Akar fundamental dari absennya visi pembangunan jangka panjang ini terletak pada benturan struktural antara garis waktu (timeline) penyelamatan ekonomi pasca-tambang dengan rigiditas siklus elektoral lima tahunan. Menginvestasikan triliunan rupiah untuk mentransformasi ribuan entitas UMKM dari sektor informal menjadi ekosistem bisnis yang tangguh adalah sebuah proses marathon yang rumit, senyap, dan memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Hal ini dibuktikan secara eksplisit dari postur APBD Bojonegoro Tahun 2023-2024, di mana alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur fisik—seperti jalan beton, jembatan, dan megaproyek fasilitas perkotaan—tercatat menyedot lebih dari 40% total anggaran belanja daerah, sebuah ketimpangan yang teramat ekstrem jika disandingkan dengan alokasi belanja langsung untuk pemberdayaan ekonomi

kerakyatan (UMKM) yang konsisten terpuruk di bawah angka 2%.

Ketimpangan alokasi tersebut adalah manifestasi dari rasionalitas politik para elite yang tidak memiliki insentif elektoral untuk memikirkan krisis satu dekade ke depan. Membina UMKM membutuhkan perubahan perilaku kultural, peningkatan literasi manajerial, hingga negosiasi pembukaan akses pasar internasional; sebuah kerja keras yang hasilnya tidak akan bisa langsung dilihat, difoto, atau diklaim sebagai prestasi politik pada akhir masa jabatan. Bagi seorang petahana yang bersiap menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) berikutnya, mengunci dana triliunan rupiah untuk program inkubasi UMKM yang abstrak dianggap sebagai langkah bunuh diri politik. Rasionalitas elektoral ini memaksa mereka untuk mencari jalan pintas yang paling aman demi mempertahankan hegemoni kekuasaan.

Jalan pintas tersebut bermuara pada pengarahannya ke kelimpahan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas menuju proyek-proyek infrastruktur fisik yang monumental serta skema bantuan sosial populis berskema tunai (Foran et al., 2024). Proyek fisik menawarkan apa yang paling didambakan oleh setiap politisi: visibilitas instan. Realitas

pragmatis ini diakui secara terbuka oleh Informan F, seorang mantan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang membeberkan, "Bagi kepala daerah dan politisi, membangun jalan rigid beton antarkecamatan sepanjang puluhan kilometer itu wujudnya jelas, monumental, dan bisa langsung dirasakan pemilih untuk kampanye periode berikutnya. Sementara itu, membina seribu UMKM agar mandiri dan bisa ekspor itu prosesnya berdarah-darah, butuh bertahun-tahun, dan pada saat mereka sukses, belum tentu mereka ingat untuk menyumbang suara bagi bupati yang merintisnya." Lebih mengerikan lagi, preferensi elite terhadap mega-proyek infrastruktur fisik sejatinya tidak hanya digerakkan oleh kalkulasi perolehan suara dari masyarakat awam, melainkan juga didorong oleh motif pemburuan rente (*rent-seeking behaviour*). Proyek-proyek fisik berskala besar membuka ruang gelap yang sangat lebar bagi praktik patronase politik. Dengan mengalokasikan triliunan rupiah untuk belanja modal konstruksi, elite penguasa dapat mendistribusikan kontrak-kontrak pekerjaan kepada para pengusaha lokal, tim sukses, atau oligarki daerah yang selama ini menjadi donatur dan penyokong mesin politik mereka. APBD



alokasi anggaran dari populisme fisik menuju kebangkitan struktural sektor riil, wacana "Masa Transisi Pasca-Ekstraktif" hanyalah sebuah fiksi tragis (Bull, 2014). Dan ketika mesin-mesin pompa minyak raksasa itu kelak benar-benar berhenti beroperasi, Bojonegoro akan mewarisi jalan-jalan beton yang megah, namun dengan urat nadi ekonomi kerakyatan yang telah mati.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini secara empiris membuktikan bahwa wacana transisi ekonomi menuju era pasca-ekstraktif di Kabupaten Bojonegoro masih terperangkap sebagai ilusi administratif. Di balik angka-angka megah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipompa oleh Dana Bagi Hasil (DBH) migas, tersembunyi kerentanan struktural yang akut pada sektor riil. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang seharusnya dipersiapkan sebagai sekoci penyelamat ekonomi masa depan justru dibiarkan terhimpit oleh gejala Dutch Disease lokal dan terpinggirkan dari rantai pasok industri ekstraktif. Kebijakan afirmatif yang selama ini diklaim oleh pemerintah daerah terbukti hanya sebatas kosmetik program seremonial yang miskin alokasi anggaran, alih-alih mewujudkan dalam intervensi struktural yang proteksionis.

Kegagalan ini bukan berakar pada kelangkaan sumber daya finansial, melainkan merupakan produk rasional dari pragmatisme elite dan siklus elektoral jangka pendek yang lebih memprioritaskan populisme infrastruktur fisik demi mengamankan insentif politik sesaat.

Secara teoritis, temuan riset ini mempertegas dan memperluas dimensi analitis dari tesis Kutukan Sumber Daya Alam (Resource Curse) pada eskalasi tata kelola sub-nasional. Studi ini membuktikan bahwa anomali kelimpahan sumber daya ekstraktif tidak hanya menciptakan distorsi makroekonomi, tetapi juga melahirkan patologi institusional berupa "narkosis fiskal" atau efek candu anggaran. Ketergantungan absolut pada instrumen dana transfer pusat telah secara efektif membunuh insentif birokrasi lokal untuk berinovasi dan membangun kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor non-ekstraktif. Kutukan ini bekerja secara senyap dengan cara menina-bobokan daya kritis institusi perencana dan badan legislatif, yang pada akhirnya membiarkan ekosistem ekonomi kerakyatan berjalan tanpa payung perlindungan negara di tengah asimetri pertarungan pasar bebas yang



nikel di Sulawesi atau batu bara di Kalimantan). Selain itu, riset kuantitatif yang memodelkan secara presisi proyeksi guncangan fiskal (fiscal shock) terhadap tingkat kelumpuhan sektor riil ketika umur tambang berakhir, serta studi etnografi yang membedah strategi resiliensi kultural dari para pelaku UMKM lokal yang menolak menyerah, akan menjadi agenda penelitian masa depan yang krusial untuk menyempurnakan kerangka mitigasi krisis daerah ekstraktif di Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

- Bull, B. (2014). Elites, classes and environmental governance: conceptual and theoretical challenges. In *Environmental Politics in Latin America* (pp. 15–30). Routledge.
- Everingham, J.-A., Svobodova, K., Lèbre, É., Owen, J. R., & Worden, S. (2022). Comparative capacity of global mining regions to transition to a post-mining future. *The Extractive Industries and Society*, 11, 101136.
- Foran, T., Ackermann, F., & Barber, M. (2024). Values in post-mining regional transition: A political-economic regime approach, with insights from Australia. *The Extractive Industries and Society*, 20, 101523.
- Frantal, B., Frajer, J., Martinát, S., & Brisudova, L. (2022). The curse of coal or peripherality? Energy transitions and the socioeconomic transformation of Czech coal mining and post-mining regions. *Moravian Geographical Reports*, 30(4), 237–256.
- Gmür, D. (2020). Not affected the same way: Gendered outcomes for commons and resilience grabbing by large-scale forest investors in Tanzania. *Land*, 9(4), 122.
- Kretschmann, J. (2020). Post-mining—a holistic approach. *Mining, Metallurgy & Exploration*, 37(5), 1401–1409.
- Kretschmann, J., Efremenkova, A. B., & Khoreshok, A. A. (2017). From mining to post-mining: the sustainable development strategy of the German hard coal mining industry. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 50(1), 012024.
- Lusasi, J., & Mwaseba, D. (2020). Gender inequality and symbolic violence in women's access to family land in the Southern Highlands of Tanzania. *Land*, 9(11), 468.



- Sholikin, A. (2018). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15, 35–50.  
<https://doi.org/10.31113/jia.v15i1.131>
- Sholikin, A. (2019). Petroleum Fund Pada Pemerintahan Lokal (Study Kasus Inovasi Kebijakan “Dana Abadi Migas” di Bojonegoro). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 16, 127–146.  
<https://doi.org/10.31113/jia.v16i1.224>
- Sholikin, A. (2021). Implementation of Green and Clean Policies in Environmental Governance Perspective in Lamongan Regency. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18, 104–117.  
<https://doi.org/10.31113/jia.v18i1.646>
- Sholikin, A. (2025). Localization of The Global Norm and Efforts to Minimize the Natural Resource Curse in Bojonegoro. *Journal of Governance*, 10(2).
- Sholikin, A., Erison, Y., & Rohmah, E. N. L. (2025). Transition of extractive industry governance: Effort towards an inclusive green economy Transisi tata kelola industri ekstraktif: Usaha menuju green economy yang inklusif. *Jurnal Sosiologi Dialektika* Vol, 20(1), 43–60.
- Vaishar, A., Lipovská, Z., & Št’astná, M. (2012). Small towns in post-mining regions. *Post-Mining Regions in Central Europe Problems, Potentials, Possibilities; Wirth, P., Mali, B. ĀC., Fischer, W., Eds*, 153–167.
- Wirth, P., Cernic-Mali, B., & Fischer, W. (2012). Problems and potentials of post-mining regions. *Post-Mining Regions in Central Europe–Problems, Potentials, Possibilities. München*, 14–31.
- Zamasiya, B., & Dhlakama, T. (2019). An Analysis of the Legal, Institutional and Policy Constraints affecting the Participation of Men and Women in Local Content Development Outcomes in the Mining Sector in Zimbabwe. *Putting Women at the Centre of Extractivism: A Compendium on Gender and Extractives*.